



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp (031) 3930732/3930733
GRESIK

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 503/44/437.74/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/532/HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-20245;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

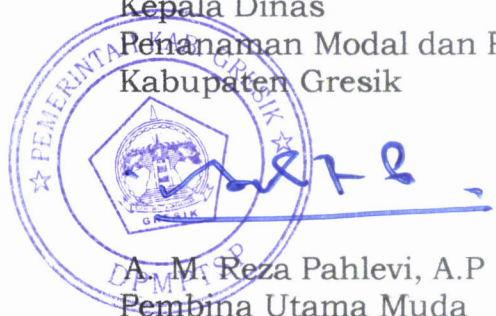
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 November 2025

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik



A. M. Reza Pahlevi, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19740803 199311 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 503/44 /437.74/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi : a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis
I.K.S.1.1	Realisasi Investasi
	Definisi
	Realisasi investasi adalah besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha

	serta tercatat pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun n Tujuan pengukuran indikator realisasi investasi adalah untuk melihat kemajuan pelaksanaan investasi di Kabupaten Gresik selama periode tertentu Realisasi investasi dihitung dengan nilai rupiah dengan target yang meningkat mulai dari 0,2 – 0,6 trilyun pertahun. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju”. Pengukuran hasil Realisasi Investasi diperoleh secara periodik <u>pertiwulan</u> dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
	Sumber Data
	Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.2	Realisasi Investasi Sektor Manufaktur
	Definisi
	Realisasi investasi sektor manufaktur adalah besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bidang industri pengolahan yang direalisasikan, dilaporkan dan tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM di tahun n Tujuan pengukuran indikator realisasi investasi sektor manufaktur adalah melihat kemajuan pelaksanaan investasi sektor industri pengolahan di Kabupaten Gresik selama periode tertentu

	Realisasi investasi sektor manufaktur dihitung dengan nilai rupiah dengan target 65 persen dari nilai realisasi investasi. Indikator RPJMD “Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran hasil Realisasi Investasi Sektor Manufaktur diperoleh secara periodik pertiwalan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
	Sumber Data
	Data realisasi investasi sektor manufaktur per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.3	Pertumbuhan Realisasi Investasi
	Definisi
	Pertumbuhan realisasi investasi adalah kenaikan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun sebelumnya yang telah direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM Untuk perhitungan pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Gresik menggunakan rumus : $\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1}{\text{Realisasi investasi tahun } n-1} \times 100\%$ Tujuan pengukuran pertumbuhan realisasi investasi untuk membandingkan, mengukur, menilai kinerja investasi dari tahun ke tahun sebagai dasar evaluasi kebijakan. Pertumbuhan realisasi investasi dihitung berdasarkan kenaikan nilai investasi dari tahun sebelumnya dengan target kenaikan 0,41 sampai 0,50 persen pertahun dan satuannya persentase. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju”

	Pengukuran hasil Pertumbuhan Realisasi Investasi dilakukan secara periodik pertiwalan dari data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian dihitung pertumbuhannya.
	Sumber Data
	Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.4	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Manufaktur
	Definisi
	Pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur adalah kenaikan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor industri pengolahan dari tahun sebelumnya yang telah direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM Untuk perhitungan pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur di Kabupaten Gresik menggunakan rumus : $\frac{\text{Realisasi investasi sektor manufaktur tahun } n - \text{Realisasi investasi sektor manufaktur tahun } n - 1}{\text{Realisasi investasi sektor manufaktur tahun } n - 1} \times 100\%$ Tujuan pengukuran pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur adalah untuk membandingkan, mengukur, menilai kinerja investasi sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun sebagai dasar evaluasi kebijakan pemerintah. Pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur ditargetkan 0,5% sampai 2,8% setiap tahunnya dan satuannya persentase. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “ Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju”

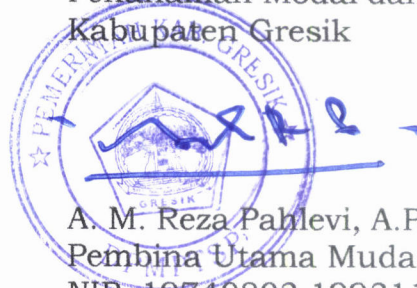
	Pengukuran hasil Pertumbuhan Realisasi Investasi dilakukan secara periodik pertiwalan dari data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian dihitung pertumbuhannya.	
	Sumber Data	
	Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	
I.K.S.1.5	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	
	Definisi	
	Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi PDRB atas dasar Harga Berlaku (ADHB) dari sektor industri pengolahan terhadap PDRB total. Semakin besar nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan, maka nilai Rasio PDRB Industri Pengolahan akan semakin tinggi (ceteris paribus). Formulasi Rasio PDRB Industri Pengolahan = $\frac{\text{PDRB ADHB Industri Pengolahan} \times 100\%}{\text{PDRB ADHB Total}}$ Tujuan pengukuran rasio PDRB industri pengolahan untuk mengukur kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian di Kabupaten Gresik Pengukuran Rasio PDRB Industri Pengolahan ditargetkan menyesuaikan Indikator Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan kenaikan 0,01 sampai 0.95 persen pertahun dan satuan persentase. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “ Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran hasil Rasio PDRB Industri Pengolahan dilakukan secara periodik pertahun	

	Sumber Data	
	Publikasi PDRB menurut lapangan usaha oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	
I.K.S.1.6	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)	
	Definisi	
	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM adalah perbandingan jumlah perusahaan usaha besar yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik Tujuan pengukuran rasio kemitraan usaha besar dengan UMKM adalah untuk menilai tingkat keterlibatan UMKM dalam rantai besar pasok usaha besar sehingga dapat mendorong UMKM yang belum bermitra untuk dapat bermitra Pengukuran Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM dihitung dengan kenaikan perusahaan besar yang bermitra sebesar 5 perusahaan pertahun dengan pembanding jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik tetap sebesar 800 perusahaan pertahun dengan satuan perusahaan. Kriteria perusahaan besar disini adalah perusahaan dengan modal usaha lebih dari 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “ Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM dilakukan periodik pertahun	
	Sumber Data	
	Data perusahaan dan kemitraan pada laman OSS	
S.2	Meningkatnya kemudahan layanan investasi	

I.K.S.2.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal
	Definisi
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka berdasarkan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tujuan pengukuran nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perizinan dan penanaman modal untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan perizinan dan penanaman modal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal dihitung dalam rentang 0-100 dengan mempertahankan nilai “Sangat Baik” setiap tahunnya. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “ Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dengan 9 unsur yaitu persyaratan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas layanan, perilaku petugas layanan, sarana prasarana dan penanganan pengaduan. Kategori mutu pelayanan survei kepuasan masyarakat yaitu : 1. 25,00 – 64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik) 2. 65,00 – 76,60 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik) 3. 76,61 – 88,30 dengan mutu pelayanan B (Baik) 4. 88,31 - 100, 00 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)

	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan setiap enam bulan sekali	
	Sumber Data	
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	

Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan PTSP
 Kabupaten Gresik



A. M. Reza Pahlevi, A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740803 199311 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : Plt. KEPALA SEKRETARIAT

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	Sasaran kegiatan yang tercapai di Sekretariat dibagi seluruh kegiatan di Sekretariat	Monev Renja
2	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Disposisi pimpinan
3	Melaksanakan Verifikasi Penyusunan Laporan Bulanan	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Laporan Bulanan
4	Memverifikasi bukti bukti administrasi Keuangan DPA	Jumlah verifikasi laporan	Jumlah verifikasi laporan	DPA
5	Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Kegiatan APBD	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Laporan Kegiatan
6	Menandatangani surat cuti, STS, SKR dan verifikasi undangan dan surat keluar masuk melalui srikandi	Jumlah surat cuti, verifikasi undangan dan surat keluar masuk melalui srikandi	Jumlah surat cuti, verifikasi undangan dan surat keluar masuk melalui srikandi	Surat masuk/surat keluar
7	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan	Jumlah pemeliharaan	Surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
8	Merencanakan Rencana Kerja	Jumlah data	Jumlah data	Rencana Kerja
9	Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang PTSP

Fungsi : a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan; c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan; e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan; f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan; g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang PTSP yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/NIB/persetujuan/surat pernyataan	Persentase penyelesaian izin	Jumlah izin yang diterbitkan dibagi jumlah target izin yang masuk x 100 %	Rekap data izin
2	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Disposisi pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal

Fungsi : a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah; c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah; e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum; i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal; k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif dan berdaya saing	Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah	Jumlah investasi manufaktur tahun n dibagi Jumlah total investasi tahun n x 100%	Satu data BKPM
2	Meningkatnya promosi penanaman modal secara terarah, informatif dan kolaboratif mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di daerah	Pertumbuhan promosi penanaman modal	(Akumulasi jenis x Freq Tahun n - Akumulasi jenis x Freq Tahun n-1) / Akumulasi jenis x Freq Tahun n-1 dikali 100%	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
3	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah akumulasi investor tahun n dikurangi jumlah akumulasi investor (baseline) dibagi Jumlah akumulasi investor (baseline) dikali 100%	Satu data BKPM
4	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif melalui pertumbuhan PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun n- Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun n-1	BPS
5	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Disposisi pimpinan
6	Tersusunnya dan ditetapkan kebijakan daerah terkait pemberian fasilitas/insentif serta kemudahan penanaman modal.	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
7	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	Dokumen
8	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	Jumlah jenis promosi penanaman modal	Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal

Fungsi : a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah; c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah; e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum; i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal; k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM	Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM dibagi Jumlah Perusahaan yang memiliki Ijin Usaha dikali 100%	OSS
2	Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan membuka usaha	Permasalahan dan hambatan yang diselesaikan dibagi jumlah permasalahan dan hambatan yang dilaporkan oleh pelaku usaha x 100%	Rekap laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha setiap bulan
3	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif	Realisasi total terhadap target investasi	Realisasi investasi dibagi target investasi x 100%	Satu data BKPM
4	Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan	Tingkat layanan penanaman modal dan persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Nilai Pemerintahan Digital (PEMDI)	Tim penilai Pemerintahan Digital (PEMDI)
5	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan identifikasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan pengawasan dan identifikasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan pengawasan dan identifikasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal	Laporan Berita Acara Pemeriksaan
6	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi terkait pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi terkait pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi terkait pelaksanaan penanaman modal	Daftar Hadir Pelaku Usaha
7	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan	Notula Hasil Koordinasi
8	Tersusunnya data dan informasi perizinan dan Non Perizinan berbasis system pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	Dokumen Data Perizinan dan Non Perizinan
9	Tersusunnya dokumen realisasi investasi	Jumlah dokumen realisasi investasi	Jumlah dokumen realisasi investasi	Dokumen Realisasi Investasi
10	Terlaksananya Perintah Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	Jumlah disposisi yang dilaksanakan	Jumlah disposisi yang dilaksanakan	Disposisi Pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal

Fungsi : a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah; c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah; e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum; i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal; k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Tersusunnya dokumen perencanaan penanaman modal	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	Dokumen
2	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen peta potensi
3	Termutakhirnya data potensi investasi daerah pada Sistem PIR	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Dokumen PIR
4	Tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPM
5	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Disposisi pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA

Tugas : membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal

Fungsi : a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah; c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah; e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum; i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal; k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terselenggaranya pemberian fasilitas dan/atau insentif yang tepat sasaran, sesuai kewenangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberian insentif	Notulen Hasil Evaluasi
2	Terselenggaranya promosi investasi penanaman modal	Jumlah jenis promosi penanaman modal	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi Penanaman Modal Terselenggara	Dokumen
3	Terlaksananya promosi penanaman modal daerah Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi Penanaman Modal yang Diikuti	Laporan
4	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Sarana Promosi Investasi Penanaman Modal Terlaksana	Dokumen
5	Tersusunnya Keputusan/ Ketetapan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal secara adil, transparan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen .
6	Melaksanakan Kegiatan Fasilitas, Konsultasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan atau Promosi Dibidang Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Fasilitas, Konsultasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Fasilitas, Konsultasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang telah dilaksanakan	Berita Acara Fasilitas
7	Menyusun Perencanaan Kegiatan terkait Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah rumusan perencanaan Kegiatan terkait Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rumusan perencanaan Kegiatan Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen
8	Menyusun Laporan Kegiatan terkait Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan terkait Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan terkait Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan
9	Memvalidasi, memverifikasi administrasi terkait Kegiatan Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah validasi, verifikasi administrasi terkait Kegiatan Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen administrasi tervalidasi, terverifikasi terkait Kegiatan Promosi Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen
10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan	Jumlah Tugas Lain yang Terlaksana	Jumlah Tugas Lain yang Terlaksana	Laporan
11	Terlaksananya Tugas Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Tugas Lain yang Terlaksana	Jumlah Tugas Lain yang Terlaksana	Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	Rekap data izin
2	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
3	Terlaksananya Perintah Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	Melaksanakan Perintah Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	Jumlah disposisi yang dilaksanakan	Jumlah disposisi yang dilaksanakan dibagi jumlah disposisi yang ditugaskan dikali seratus persen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang PTSP

Fungsi : a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan; c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan; e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan; f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan; g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang PTSP yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Rekap pengaduan dan konsultasi
2	Terlaksananya Perintah Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	Melaksanakan Perintah Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	Jumlah disposisi yang dilaksanakan	Jumlah disposisi yang dilaksanakan dibagi jumlah disposisi yang ditugaskan dikali seratus persen
3	Terlaksananya pelayanan persetujuan lingkungan perizinan berusaha dan non berusaha	Jumlah pelayanan persetujuan lingkungan perizinan berusaha dan non berusaha	Jumlah pelayanan persetujuan lingkungan perizinan berusaha dan non berusaha	Berkas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang PTSP

Fungsi : a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan; c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan; e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan; f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan; g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang PTSP yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan		
2	Terlaksananya penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang PTSP

Fungsi : a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan; c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan; e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan; f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan; g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang PTSP yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah kepada pelaku usaha	Laporan pertanggungjawaban administrasi
2	Melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen syarat perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan	Jumlah hasil pemeriksaan keabsahan dokumen syarat perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan	Jumlah hasil pemeriksaan keabsahan dokumen syarat perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan	12 Laporan
3	Merumuskan usulan keputusan permohonan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan	Jumlah dokumen usulan keputusan permohonan perizinan, perizinzn berusaha dan nonperizinan	Jumlah dokumen usulan keputusan permohonan perizinan, perizinzn berusaha dan nonperizinan	12 Laporan
4	Melakukan pengawasan pengajuan perizinan pada sistem perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan berusaha	Jumlah hasil pengawasan pengajuan perizinan pada sistem perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan berusaha	Jumlah hasil pengawasan pengajuan perizinan pada sistem perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan berusaha	12 Laporan
5	Menganalisis permasalahan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan	Jumlah hasil analisa permasalahan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan	Jumlah hasil analisa permasalahan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan	12 Laporan
6	Terlaksananya perintah pimpinan yang sesuai dengan sasaran organisasi	Persentase disposisi yang dilaksanakan	Persentase disposisi yang dilaksanakan	12 laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal

Fungsi : a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah; c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah; e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum; i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal; k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Dinas

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan di daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan rapat analisa, perencanaan, tindak lanjut dan evaluasi pengawasan penanaman modal diberikan kepada pelaku usaha	Undangan dan notulen - BAF
2	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku, dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Jumlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengawasan hasil kegiatan inspeksi lapangan pengawasan penanaman modal	BAP Pengawasan
3	Terlaksananya kegiatan konsultasi serta tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha	Jumlah fasilitasi, konsultasi serta tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha	Jumlah Berita Acara Fasilitasi, konsultasi serta tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha	BAF
4	Terlaksananya penganalisaan data sebagai pertimbangan kegiatan pengawasan penanaman modal	Jumlah data yang dianalisa sebagai pertimbangan kegiatan pengawasan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha sasaran pengawasan, maupun diluar sasaran pengawasan yang mendukung kegiatan pengawasan	Data pengawasan penanaman modal
5	Terlaksananya kegiatan inspeksi lapangan pengawasan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan inspeksi lapangan pengawasan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan inspeksi lapangan pengawasan penanaman modal	Surat tugas pengawasan
6	Terlaksananya pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban terkait adminitrasi kegiatan yang diperiksa	Jumlah dokumen pertanggungjawaban yang diperiksa	Jumlah dokumen pertanggungjawaban terkait adminitrasi kegiatan yang diperiksa	Dokumen administrasi
7	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan penanaman modal	Jumlah laporan kegiatan yang disusun dari hasil pengawasan penanaman modal	Jumlah laporan kegiatan yang disusun dari hasil pengawasan penanaman modal	Dokumen administrasi, kegiatan rapat, BAP Pengawasan, BAF dan kegiatan pendukung lainnya
8	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Disposisi pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas : a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan; b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan; c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan; d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor; e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan; f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor; g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsi : -

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
2	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Data gaji
3	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
4	Terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
5	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
6	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
7	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
8	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
9	Tersedianya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
10	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
11	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
12	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
13	Terlaksananya jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
14	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
15	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
16	Tersedianya penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
17	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
18	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
19	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
20	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
21	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
22	Terlaksananya dukungan pelaksanaan SPBE	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

23	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
24	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Disposisi pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
2	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
3	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
4	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
5	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Jumlah tugas lain sesuai disposisi pimpinan	Disposisi pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas	Memeriksa dan mereview Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan OPD dalam 1 tahun
2	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas	Memeriksa laporan pengelolaan pembukuan dan perbendaharaan	Jumlah laporan pengelolaan pembukuan dan perbendaharaan	Jumlah laporan pengelolaan pembukuan dan perbendaharaan dalam 1 tahun
3	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas	Memverifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan	Jumlah verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan	Jumlah verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam 1 tahun
4	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas	Merekap dan menkoordinasikan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan	Jumlah laporan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan	Jumlah laporan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan dalam 1 tahun
5	Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada kegiatan APBD	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan pada kegiatan APBD	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan pada kegiatan APBD dalam 1 tahun
6	Terlaksananya Perintah Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	Melaksanakan Perintah Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	jumlah disposisi yang dilaksanakan	Jumlah disposisi yang dilaksanakan dibagi jumlah disposisi yang ditugaskan dikali seratus persen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menganalisa data yang dibutuhkan untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gresik	Jumlah data yang dibutuhkan untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gresik	Jumlah data yang dibutuhkan untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gresik	Data perizinan perusahaan dan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal
2	Membuat dokumen administrasi pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kabupaten Gresik	Jumlah dokumen administrasi pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kabupaten Gresik	Jumlah dokumen administrasi pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kabupaten Gresik	Dokumen administrasi kegiatan
3	Melakukan kegiatan kunjungan lapangan terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gresik	Jumlah kegiatan kunjungan lapangan terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gresik	Jumlah kegiatan kunjungan lapangan terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gresik	Berita Acara Kegiatan Kunjungan
4	Memberikan penyuluhan dan fasilitasi serta konsultasi kepada pelaku usaha	Jumlah penyuluhan dan fasilitasi serta konsultasi yang diberikan kepada pelaku usaha	Jumlah penyuluhan dan fasilitasi serta konsultasi yang diberikan kepada pelaku usaha	Laporan dan Berita Acara hasil fasilitasi
5	Melakukan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan pemangku kepentingan	Jumlah konsultasi, dialog, dan diskusi dengan pemangku kepentingan	Jumlah konsultasi, dialog, dan diskusi dengan pemangku kepentingan	undangan rapat
6	Melakukan verifikasi terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Gresik	Jumlah verifikasi terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Gresik	Jumlah verifikasi terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Gresik	Rekap hasil verifikasi LKPM
7	Melakukan tugas lain yang diberikan atasan	Jumlah tugas-tugas lain yang diberikan atasan	Jumlah tugas-tugas lain yang diberikan atasan	Disposisi pimpinan dan dokumentasi kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PERENCANA AHLI PERTAMA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyajikan data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang disajikan	Jumlah data dan informasi yang disajikan	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik, Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah
2	Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data	Terlaksananya keefektifan pelaksanaan pengumpulan data	Terlaksana keefektifan pelaksanaan pengumpulan data	Data Dukung SPIP, Manajemen Risiko, Data Internal Pegawai
3	Menyusun dokumen manajemen risiko	Jumlah dokumen manajemen risiko yang telah disusun	Penyusunan dokumen manajemen risiko sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah	Manajemen Risiko Strategis, Manajemen Risiko Operasional, Manajemen Risiko Kemitraan
4	Melaksanakan pengisian data inovasi pada web inovasi secara berkala	Terlaksananya pengisian data inovasi pada web inovasi setiap triwulan	Pengisian data dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan	Web Inovasi /Laporan/Berita Acara
5	Melaksanakan pengisian realisasi Reformasi Birokrasi Tematik dan mengumpulkan data dukung setiap triwulan	Terlaksananya pengisian realisasi Reformasi Birokrasi Tematik dan mengumpulkan data dukung setiap triwulan	Terlaksananya pengisian realisasi Reformasi Birokrasi Tematik dan mengumpulkan data dukung setiap triwulan	Dokumen Data Dukung, Laporan pengaduan, SK pemberian insentif
6	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan	Jumlah kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Surat Tugas / Nota Dinas / Disposisi, Rencana Kerja, Hasil koordinasi atau arahan lisan, SOP.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STAF PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

Tugas : Melakukan penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan terkait transaksi keuangan

Fungsi : 1. Melaksanakan pembukuan pengeluaran dan penerimaan ke buku kas umum (BKU) 2. Melaksanakan pencairan uang yang telah diterbitkan SP2D oleh BPPKAD dan menyimpan ke dalam brankas 3. Membuat surat permintaan Pencairan (SPP) UP, GU, TU, LS 4. Melaksanakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan 5. Memungut pajak PPh dan PPh 6. Melaksanakan entri data keuangan melalui SIPKD 7. Melaksanakan tugas lain sesuai disposisi/perintah atasan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyimpan dan mencairkan uang	Jumlah uang yang dicairkan dan disimpan kedalam brankas	Jumlah uang yang dicairkan dan disimpan kedalam brankas	Kali
2	Membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) UP, GU, TU dan LS	Jumlah Surat Permintaan Pencairan (SPP) UP, GU, TU dan LS yang dibuat	Jumlah Surat Permintaan Pencairan (SPP) UP, GU, TU dan LS yang dibuat	Dokumen
3	Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan	Jumlah laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disusun	Jumlah laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disusun	Dokumen
4	Memungut dan menyetor pajak PPh dan PPh	Jumlah pajak PPh dan PPh yang dipungut dan disetor	Jumlah pajak PPh dan PPh yang dipungut dan disetor	Pajak
5	Mengentri data keuangan melalui SIPD	Jumlah data keuangan yang di entri melalui SIPD	Jumlah data keuangan yang di entri melalui SIPD	Data
6	Melaksanakan tugas lain yang dilaksanakan sesuai disposisi/perintah atasan	Jumlah tugas lain yang dilaksanakan sesuai disposisi/perintah atasan	Jumlah tugas lain yang dilaksanakan sesuai disposisi/perintah atasan	Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan perizinan

Fungsi : a. Melayani pemohon yang berkonsultasi dan sebagai front office pelayanan perizinan; b. Mengumpulkan data pemohon yang akan di checklist sebagai syarat izin secara daring; c. Penataan dokumen perizinan untuk dilakukan proses verifikasi; d. Mengatur pelaksanaan survey dan rapat pokja; e. Melaksanakan permintaan data apabila ada berkas atau kelengkapan yang kurang berdasarkan hasil BAP atau rapat pokja; f. Menyusun draf SK; g. Melakukan tugas lain sesuai disposisi/perintah atasan;

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pertumbuhan Informasi	Jumlah Pemohon Yang Berkonsultasi Dan Sebagai Front Office Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pemohon Yang Berkonsultasi Dan Sebagai Front Office Pelayanan Perizinan Berusaha	Jadwal Petugas Front Office
2	Memeriksa Dan Mengidentifikasi Berkas / Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Berkas / Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Berkas / Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Sesuai Dengan Peraturan	Berkas / Dokumen Pemohon
3	Terlaksananya Tugas Lain Yang Diberikan Sesuai Meningkatnya Penyelesaian Permohonan Izin Dengan Tepat Waktu	Jumlah Tugas Lain Yang Terlaksana Sesuai Meningkatnya Penyelesaian Permohonan Izin Dengan Tepat Waktu	Jumlah Tugas Lain Yang Terlaksana Sesuai Meningkatnya Penyelesaian Permohonan Izin Dengan Tepat Waktu	Dokumentasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STAF PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

Tugas : Melakukan analisa terhadap perencanaan program dan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan program

Fungsi : a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran; b. Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) dan perubahannya; c. Menyusun dokumen rencana penyerapan pendapatan dan belanja daerah (R1-R3), kurva pendapatan, kurva belanja dan schedule pelaksanaan sub kegiatan serta perubahannya; d. Menganalisa laporan pelaksanaan kegiatan APBD (P1-P4) serta kurva belanja; e. Menganalisa Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2022; f. Menganalisa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); g. Menganalisa dokumen matrik Renstra 2021-2026; h. Menganalisa dokumen SAKIP (Renaksi, Monev Renaksi dll); i. Menganalisa dokumen pengadaan langsung; j. Menganalisa tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran	Dokumen RKA dan RPKA
2	Menyusun dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) dan dokumen perubahannya	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) dan dokumen perubahannya	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) dan dokumen perubahannya	Dokumen RAK dan perubahannya
3	Menyusun dokumen rencana penyerapan pendapatan dan belanja daerah (R1-R3), kurva pendapatan, kurva belanja dan schedule pelaksanaan sub kegiatan serta perubahannya	Jumlah dokumen rencana penyerapan pendapatan dan belanja daerah (R1-R3), kurva pendapatan, kurva belanja dan schedule pelaksanaan sub kegiatan serta perubahannya	Jumlah dokumen rencana penyerapan pendapatan dan belanja daerah (R1-R3), kurva pendapatan, kurva belanja dan schedule pelaksanaan sub kegiatan serta perubahannya	Laporan R1-R3, schedule kegiatan
4	Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD (P1-P4) serta kurva belanja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD (P1-P4) serta kurva belanja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD (P1-P4) serta kurva belanja	Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD (P1-P4)
5	Menyusun Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026	Jumlah Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026	Jumlah Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026	Renja DPMPTSP
6	Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	LKPJ
7	Menyusun dokumen Renstra 2025-2029	Jumlah dokumen Renstra 2025-2029	Jumlah dokumen Renstra 2025-2029	Renstra 2025-2029
8	Menyusun dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu, Renaksi, Monev Renaksi, LKJIP)	Jumlah dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu, Renaksi, Monev Renaksi, LKJIP)	Jumlah dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu, Renaksi, Monev Renaksi, LKJIP)	Dokumen SAKIP
9	Menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Laporan Pengendalian dan dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Disposisi pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyusun dokumen kelengkapan dan melaksanakan kegiatan penunjang kajian peta potensi dan peluang investasi Kabupaten/Kota	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi Kab/Kota	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi Kab/Kota	Dokumen
2	Menyusun Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	Dokumen
3	Melaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Dokumen
4	Menyusun dokumen kelengkapan dan melaksanakan kegiatan penunjang kajian berkaitan strategi promosi penanaman modal	Jumlah kajian berkaitan strategi promosi penanaman modal	Jumlah kajian berkaitan strategi promosi penanaman modal	Dokumen
5	Menyusun dokumen kelengkapan dan melaksanakan kegiatan penunjang berkaitan pelaksanaan promosi penanaman modal	Jumlah kegiatan berkaitan pelaksanaan promosi penanaman modal	Jumlah kegiatan berkaitan pelaksanaan promosi penanaman modal	Kali
6	Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan	Jumlah tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan	Jumlah tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan	Kali

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STAF PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;	Jumlah penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;	Laporan
2	mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah	Jumlah bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;	Jumlah bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;	Laporan
3	melaksanakan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah penatausahaan barang milik daerah;	Jumlah penatausahaan barang milik daerah;	Laporan
4	mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diinventarisir	Jumlah barang milik daerah yang diinventarisir	Data
5	mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah	Jumlah pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;	Jumlah pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;	Kali
6	mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah dokumen yang diusulkan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah dokumen yang diusulkan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Dokumen
7	mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah	jumlah penilaian barang milik daerah;	jumlah penilaian barang milik daerah;	Dokumen
8	meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	jumlah dokumen yang diusulkan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;	jumlah dokumen yang diusulkan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;	Dokumen
9	mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	jumlah laporan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	jumlah laporan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Dokumen
10	mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD	jumlah laporan barang milik daerah dari SKPD	jumlah laporan barang milik daerah dari SKPD	Dokumen
11	mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang dikelola.	jumlah barang milik daerah yang dikelola.	Laporan
12	Melaksanakan administrasi kepegawaian	jumlah dokumen administrasi kepegawaian	jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen
13	melakukan tugas lain sesuai disposisi/ perintah atasan	Jumlah tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai disposisi	Jumlah tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai disposisi	Dokumen

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STAF PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PPPK PW)

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terselenggaranya pelayanan umum kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Laporan pertanggungjawaban administrasi kegiatan
		Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	Laporan pertanggungjawaban administrasi kegiatan
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan rapat koordinasi dan konsultasi
2	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Disposisi pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengelolaan sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terimplementasikannya sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Melakukan pencadangan (backup) dan log basis data, basis data yang dipulihkan (restore), keberlangsungan proses bisnis	Melakukan pencadangan (backup) dan log basis data, basis data yang dipulihkan (restore), keberlangsungan proses bisnis	Laporan pelaksanaan kegiatan
		Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks	Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks	Laporan pelaksanaan kegiatan
		Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi	Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi	Laporan pengelolaan permintaan dan layanan teknologi informasi
		Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi	Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi	Dokumen kebutuhan informasi
		Melakukan implementasi rancangan integrasi data	Melakukan implementasi rancangan integrasi data	Laporan Pelaksanaan implementasi rancangan integrasi data
		Menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data	Menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data	Laporan pengujian rancangan integrasi data
		Melakukan sebuah perancangan sistem informasi	Melakukan sebuah perancangan sistem informasi	Dokumen prosedur pengujian rancangan integrasi data
		Melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi	Melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi	Data uji coba sistem informasi
		Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data	Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data	Dokumen deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data
		Melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi	Melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi	Laporan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi
		Mengembangkan program aplikasi sistem informasi	Mengembangkan program aplikasi sistem informasi	Dokumentasi pengembangan/peremajaan program aplikasi lama dan baru
		Melakukan perancangan sistem informasi	Melakukan perancangan sistem informasi	Dokumen hasil perancangan sistem informasi
		Melakukan instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi	Melakukan instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi	Laporan instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi
		Menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi	Menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi	Buku petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi
2	Melaksanakan tugas lain yang diperintah pimpinan	Jumlah disposisi yang dilaksanakan	Jumlah disposisi yang dilaksanakan	Disposisi Pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STAF PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melakukan konsultasi dan pendampingan pengurusan perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan kepada pelaku usaha	Jumlah pemohon yang didampingi di front office	Jumlah pemohon yang berkonsultasi di Front Office Pelayanan Perizinan	Daftar Hadir
2	Memeriksa dan mengidentifikasi dokumen permohonan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Jumlah berkas/dokumen permohonan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diperiksa dan diidentifikasi	Jumlah berkas/dokumen permohonan perizinan usaha sektor pendidikan, perdagangan dan ketenagakerjaan yang diperiksa dan diidentifikasi	Berkas Rekapitulasi
3	Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi terhadap pemohon Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Jumlah Pemohon yang menerima sosialisasi/fasilitasi untuk pemohon Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Jumlah Pemohon yang menerima sosialisasi dan fasilitasi untuk pemohon Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Dokumentasi/Laporan
4	Melaksanakan survei/ tinjauan lapangan dan rapat untuk kesesuaian Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Jumlah pendampingan survei/tinjauan lapangan dan rapat untuk kesesuaian Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Jumlah pendampingan tinjauan lapangan dan rapat untuk kesesuaian Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dokumentasi/Laporan
5	Menyusun dan Mencetak Draft Surat Keputusan/Persetujuan Izin	Jumlah Draft Surat Keputusan/Persetujuan Izin yang disusun	Jumlah Draft Surat Keputusan/Persetujuan Izin yang disusun	Berkas SK
6	Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan	Jumlah tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan yang dilakukan	Jumlah tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan yang dilakukan	Dokumentasi/Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STATISTISI AHLI PERTAMA

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan entri data permohonan penerbitan SK PBG dan Sertifikat SLF	Jumlah permohonan penerbitan SK PBG dan Sertifikat SLF	Jumlah permohonan penerbitan SK PBG dan Sertifikat SLF	Permohonan
2	Menyusun media penyajian statistik perizinan	Jumlah dokumen penyajian statistik yang disajikan	Jumlah dokumen penyajian statistik yang disajikan	Dokumen
3	Mengelola data hasil pengumpulan data	Jumlah data yang telah diolah	Jumlah data yang telah diolah	Data
4	Melakukan analisis terhadap data statistik dan faktor pendukung lain yang berkaitan dengan perizinan	Jumlah analisis yang telah dilakukan	Jumlah analisis yang telah dilakukan	Dokumen
5	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan	Jumlah tugas yang diberikan atasan	Jumlah tugas yang diberikan atasan	Kali

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Tugas : Melakukan kegiatan pengelolaan perizinan

Fungsi : a. Melayani pemohon yang berkonsultasi dan sebagai front office pelayanan perizinan; b. Mengumpulkan data pemohon yang akan di checklist sebagai syarat izin secara daring; c. Penataan dokumen perizinan untuk dilakukan proses verifikasi; d. Mengatur pelaksanaan survey dan rapat pokja; e. Melaksanakan permintaan data apabila ada berkas atau kelengkapan yang kurang berdasarkan hasil BAP atau rapat pokja; f. Menyusun draf SK; g. Melakukan tugas lain sesuai disposisi/perintah atasan;

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan	Jumlah pemohon yang berkonsultasi di Front Office Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Jumlah pemohon yang berkonsultasi di Front Office Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Daftar Hadir/Absensi
2	Memeriksa dan mengidentifikasi berkas/dokumen permohonan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Jumlah berkas/dokumen permohonan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diperiksa dan diidentifikasi	Jumlah berkas/dokumen permohonan perizinan usaha sektor pendidikan, perdagangan dan ketenagakerjaan yang diperiksa dan diidentifikasi	Berkas Rekapitulasi
3	Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi terhadap pemohon Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Jumlah Pemohon yang menerima sosialisasi/fasilitasi untuk pemohon Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Jumlah Pemohon yang menerima sosialisasi dan fasilitasi untuk pemohon Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Dokumentasi/Laporan
4	Melaksanakan survei/ tinjauan lapangan dan rapat untuk kesesuaian Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan peraturan	Jumlah pendampingan survei/tinjauan lapangan dan rapat untuk kesesuaian Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Jumlah pendampingan tinjauan lapangan dan rapat untuk kesesuaian Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dokumentasi/Laporan
5	Menyusun dan Mencetak Draft Surat Keputusan/Persetujuan Izin	Jumlah Draft Surat Keputusan/Persetujuan Izin yang disusun	Jumlah Draft Surat Keputusan/Persetujuan Izin yang disusun	Berkas SK
6	Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan	Jumlah tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan yang dilakukan	Jumlah tugas lain yang diberikan sesuai disposisi/perintah atasan yang dilakukan	Dokumentasi/Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jabatan : STAF PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tugas :

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Mempelajari kebijakan, pedoman, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai dasar pelaksanaan tugas	Terlaksananya kegiatan pembelajaran dan peningkatan pemahaman di bidang TIK	Terdokumentasinya keikutsertaan dalam kegiatan webinar, bimtek, sosialisasi, atau pembelajaran terkait TIK	Dokumen
2	Melaksanakan administrasi penyusunan, pengelolaan, dan pendokumentasian dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Terdokumentasinya dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Tersusunnya dan/atau terkelolanya dokumen SPBE, SMKI, SOP, laporan, dan dokumen pendukung TIK lainnya sesuai ketentuan	Dokumen
3	Melaksanakan administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi	Terlaksananya administrasi pendukung kegiatan teknologi informasi dan komunikasi	Terdokumentasinya administrasi kegiatan, pengumpulan bahan, dan pendampingan administratif kegiatan TIK	Dokumen
4	Membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak	Jumlah objek multimedia kompleks yang dibuat dengan piranti lunak	Tersusunnya daftar dan dokumentasi objek multimedia kompleks yang dibuat menggunakan piranti lunak tertentu	Dokumen
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas	Terlaksananya tugas kedinasan lain	Tersusunnya laporan tugas kedinasan lain	Dokumen